

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu signifikan, transformasi digital telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengelola informasi. Perkembangan zaman yang tak terbendung ini memberikan dampak positif dan negatif diberbagai sektor kehidupan manusia, salah satu dampak positifnya dapat dilihat pada munculnya berbagai sistem informasi canggih yang kini telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Menurut Hutahaean (2016) sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan transaksi setiap harinya, mendukung operasional, memiliki fungsi manajerial, mendukung kegiatan strategis, dan sekaligus menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal.

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi semakin canggih dan terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Menurut Zulvikri & Amani (2024) munculnya sistem informasi yang semakin kompleks dan inovatif menjadi salah satu bukti nyata dari transformasi digital yang terjadi, sehingga menuntut seseorang dalam hal ini suatu lembaga maupun instansi untuk menggunakan sebuah aplikasi berbasis web untuk mencari, mengatur serta menyimpan dokumen-dokumen yang penting. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan munculnya volume

data informasi yang semakin banyak dan kompleks, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan informasi.

Seperti yang dipaparkan Telaumbanua et al (2024) di Indonesia sendiri pemerintah sudah meluncurkan berbagai inovasi terkait sistem informasi yang diharapkan dapat membantu dalam kegiatan bernegara terkhusus pada pengelolaan arsip, pemerintah sendiri dapat memaksimalkan kemajuan teknologi informasi tersebut untuk memberikan informasi dan pelayanan untuk warga negara dengan cara yang lebih transparan. Jadi, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi negara bertujuan untuk memberikan peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan disebut dengan *e-government*. Pada pelaksanaan *e-government* dalam urusan kearsipan tertuang pada Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berupa pembangunan SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional).

Pemerintah memberikan amanat melalui UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Kearsipan Nasional, diperlukan pengaplikasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Sistem Informasi Kearsipan Nasional adalah website di lingkup pemda (kab/kota/provinsi) yang digunakan untuk membantu dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip statis terkhusus yang bersifat terbuka. Fungsi SIKN tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa pembangunan SIKN berperan dalam mewujudkan arsip sebagai pilar utama dalam manajemen penyelenggaraan negara,

memastikan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, menjamin akses terhadap informasi, serta memastikan ketersediaan arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.

Menurut Arsip Negara Republik Indonesia (2024) penyelenggaraan SIKN secara khusus dituangkan dalam peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN. SIKN merupakan sistem dan sarana pelayanan informasi arsip secara nasional. Dalam konteks negara, SIKN memegang peranan krusial sebagai alat bantu dalam mengintegrasikan informasi pada bidang kearsipan dalam lingkup nasional serta menyatukan riwayat dokumenter yang tersebar atau terfragmentasi di antara berbagai lembaga kearsipan di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk dokumentasi aktivitas atau kejadian yang dihasilkan dan diterima oleh instansi negara, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi politik, organisasi sosial, serta individu, dalam rangka melaksanakan kegiatan mereka, yang mempunyai nilai informasi, sehingga perlu dikelola. Arsip memiliki banyak jenis, dalam pengelompokan jenis arsip berdasarkan fungsi, arsip dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis.

Arsip dinamis merujuk pada arsip yang secara langsung digunakan dalam aktivitas perkantoran, seperti dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan. Sementara itu, arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna/historis tertentu sehingga arsip tersebut layak untuk tetap

dilestarikan, namun sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh penciptanya dalam aktivitas operasional. (Priansa & Garnida, 2014). Sehingga bisa disimpulkan bahwa arsip dinamis yaitu arsip yang masih aktif digunakan pada kegiatan sebuah organisasi. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tak lagi dipergunakan dalam kegiatan organisasi, tetapi masih terus dilestarikan karena memiliki nilai guna untuk kepentingan tertentu.

Setiap dokumen yang berkaitan dengan suatu organisasi dan memiliki frekuensi penggunaan yang masih tinggi disebut sebagai arsip. Menurut Aprianti (2020) agar arsip tersebut dapat tertata dengan baik, diperlukan suatu sistem pengelolaan arsip yang efektif dan terstruktur seperti Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) yang umumnya lebih berfokus dalam mempersatukan arsip statis yang bersifat terbuka dalam bentuk digital karena beberapa alasan mendasar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah akan dapat dikelola dengan baik sehingga dalam memberikan pelayanan informasi bisa lebih modern, efisien, dan transparan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pahri Pahlevi, Athanasia Octavia Puspita Dewi (2020) yaitu tentang Analisis Aplikasi iJateng Dengan Menggunakan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) , yang menyatakan bahwa dengan berdasarkan 2 persepsi dari teori TAM yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan penerimaan aplikasi iJateng di kalangan pustakawan dan pengguna telah memenuhi kedua aspek dalam TAM tersebut. Penggunaan aplikasi iJateng memberikan kemudahan bagi

pustakawan dan pemustaka dalam menjalankan aktivitasnya, para pengguna lebih termudahkan ketika mencari serta membaca buku, sekaligus mengoperasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, struktur konten dan menu dalam aplikasi iJateng terbukti mendukung efisiensi kerja pustakawan dan pemustaka secara optimal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aghita Citra Rediza Putri, Athanasia Octavia Puspita Dewi (2020) yaitu tentang Analisis Penerimaan Aplikasi iSalatiga Untuk Pemustaka Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Salatiga menyatakan bahwa penerimaan aplikasi iSalatiga dengan menggunakan TAM (*Technology Acceptance Model*) menunjukkan bahwa penerimaan aplikasi iSalatiga berdasarkan model *Technology Acceptance Model* (TAM) mengindikasikan kemudahan yang diberikan kepada pengguna dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, khususnya sebagai media edukasi pembelajaran. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana edukatif bagi anak-anak, alat pembelajaran bagi pelajar, serta media rekreasi membaca. Selain itu, iSalatiga memiliki sistem yang terstruktur dengan baik, mudah digunakan, serta didukung oleh sistem keamanan yang terjamin. Secara keseluruhan, penerimaan aplikasi iSalatiga menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan dampak positif bagi penggunaannya dan dapat diterima sebagai alat yang mendukung berbagai aktivitas pengguna.

Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai penerimaan sebuah sistem informasi, kebanyakan penelitian tersebut berfokus pada aplikasi perpustakaan digital. Masih sangat jarang ditemui penelitian

tentang penerimaan sistem informasi yang berfokus pada penerapan sistem informasi kearsipan nasional yang di terapkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Salah satu contoh organisasi/instansi yang sudah menerapkan SIKN dalam mengelola arsipnya ialah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kab. Kediri. Arsip-arsip statis yang ada pada dinas ini akan dikelola menggunakan SIKN agar dapat terorganisir dengan baik dan dapat didistribusikan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kab. Kediri. Akan tetapi, terkadang adanya sistem informasi yang ada justru kurang mendukung dalam terlaksananya kegiatan tersebut, bisa karena sistem informasi yang digunakan tersebut kurang ramah untuk digunakan pengguna, atau bisa juga lebih pada pengelolanya yang tidak bisa mengoperasikannya dengan baik. Penyebab klasiknya adalah sebuah sistem membuat pengelolanya kesulitan dalam menggunakannya biasanya disebabkan terlalu berbelit belit langkahnya maupun susah difahami.

Berdasarkan observasi peneliti di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kab. Kediri, dalam penerapan sistem informasi kearsipan nasional yang terbilang masih baru karena baru efektif digunakan oleh dinas ditahun 2023, dan tak lama setelah staff kearsipan mulai efektif mengunggah arsip di sistem ini terjadi *maintenance* yang cukup lama sekitar 8 bulan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Maret 2024 yang membuat kegiatan mengolah arsip statis untuk diunggah kedalam sistem informasi kearsipan tidak bisa dilakukan, hingga di bulan Maret 2024 sistem ini baru bisa digunakan kembali.

Kemudian sejauh ini *output* atau hasil daripada arsip yang sudah diunggah di dalam sistem informasi kearsipan nasional, menurut salah satu staff masih sekitar 10% saja dari jumlah keseluruhan arsip statis yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kediri, padahal seharusnya dengan kemampuan sistem yang memadai ini seharusnya *output* yang dihasilkan atau arsip yang bisa diunggah seharusnya bisa lebih banyak, seperti halnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang telah masuk pada 10 pmda dengan penerapan SIKN terbaik berdasarkan pengawasan kearsipan dari Dinperpusip Provinsi Jawa Timur.

Keadaan lainnya yaitu belum adanya staf khusus yang ditugaskan untuk mengelola sistem informasi kearsipan nasional ini, sejauh ini yang ditugaskan dalam menerapkan sistem informasi kearsipan nasional ini adalah staf kearsipan yang ada dibagian lain yang kemudian di sub-kan atau diberi tugas tambahan untuk menjalankan sistem tersebut. Sehingga, seringkali penerapan SIKN ini akhirnya terlantar karena staf mempunyai beberapa tugas sekaligus dan tidak bisa fokus pada penerapan SIKN.

Berangkat dari beberapa permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana penerimaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri, kajian ini bertujuan untuk menilai apakah sistem informasi yang diterapkan benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh staf kearsipan. Pemahaman terhadap tingkat penerimaan ini sangat krusial bagi dinas guna

mengevaluasi kesesuaian sistem informasi yang digunakan serta memastikan bahwa sistem tersebut dapat mendukung efektivitas kerja staf kearsipan.

Untuk melihat sikap penerimaan maupun penolakan dari staf kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kediri diperlukan suatu analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai landasan dalam penelitian ini.

Alasan penggunaan teori TAM dinilai tepat dan relevan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam implementasi SIKN yaitu berdasarkan observasi penerapan SIKN yang tergolong baru dan sempat mengalami gangguan teknis selama kurang lebih delapan bulan mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan dan unggah arsip statis ke dalam sistem. Meskipun sistem tersebut secara teknis memiliki kemampuan unggah yang cukup besar, namun hingga saat ini hanya sekitar 10% arsip statis yang berhasil diunggah dan belum adanya staf khusus yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola SIKN serta adanya beban kerja ganda pada staf yang ada menjadi faktor organisasi yang turut memengaruhi penerimaan dari sistem ini.

Keadaan ini mengindikasikan kemungkinan adanya persepsi rendah terhadap kemanfaatan dan kemudahan sistem oleh para pengguna. TAM, sebagaimana dikembangkan oleh F. D. Davis & Granic (2024), menjelaskan bahwa tingkat penerimaan suatu teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dari teknologi tersebut.

Dalam konteks ini, TAM dapat digunakan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku penerimaan teknologi oleh pengguna. Teori ini juga terbukti aplikatif dalam berbagai penelitian terdahulu yang berfokus pada adopsi sistem informasi di sektor perpustakaan maupun layanan publik. Seperti pada penelitian yang dilakukan Fahlevi & Dewi (2020) dan Putri & Dewi (2020).

Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa TAM tidak hanya mampu menggambarkan perilaku penerimaan teknologi dalam konteks individual, namun juga dalam konteks kelompok yang beragam seperti pustakawan, pelajar, hingga masyarakat umum. Dengan kata lain, TAM menyediakan kerangka konseptual yang kuat dalam menilai bagaimana pengguna menanggapi penerapan sistem baru melalui persepsi mereka terhadap kemudahan dan manfaat teknologi tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan TAM dalam penelitian ini menjadi sangat tepat, karena mampu menjelaskan secara empiris bagaimana staf kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri menerima dan menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) sebagai alat bantu kerja. Maka dari itu penelitian ini berjudul **“Penerimaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kediri Berdasarkan Teori TAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan dari Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri ditinjau dengan menggunakan teori TAM?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan makna dari judul skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan istilah berdasarkan konteks penelitian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penerimaan

Penerimaan dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana pengguna atau staf kearsipan bersedia dan mampu menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dalam kegiatan pengelolaan arsip statis. Penerimaan ini dipengaruhi oleh dua komponen utama menurut

Technology Acceptance Model (TAM), yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) Narendra (2022).

b. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)

SIKN adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memfasilitasi pengelolaan arsip statis di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. SIKN memungkinkan distribusi dan akses arsip statis secara daring yang bersifat terbuka, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pelestarian memori kolektif bangsa. Zikri (2024).

c. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kediri

Instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan arsip, baik dinamis maupun statis, serta pengembangan layanan perpustakaan publik di wilayah Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini, instansi tersebut menjadi lokasi studi kasus terkait implementasi dan penerimaan SIKN oleh para staf kearsipannya.

d. *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM adalah teori yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Model ini menekankan dua variabel utama, *Perceived Usefulness* yaitu sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja mereka. Dan *Perceived Ease of Use* yaitu sejauh mana pengguna percaya bahwa

menggunakan sistem tidak akan membutuhkan banyak usah, yang pada akhirnya dari 2 aspek utama ini akan dapat digunakan untuk menggambarkan penerimaan dari SIKN tersebut. Davis & Granic (2024).

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penegasan secara operasional dari judul penelitian ini “Penerimaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri Berdasarkan Teori TAM” adalah bagaimana bentuk sikap, pandangan, dan perilaku staf kearsipan terhadap penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dalam kegiatan pengelolaan arsip statis di lingkungan instansi.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada implementasi dan penerimaan SIKN oleh staf di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri, bukan pada penilaian kualitas teknis sistem maupun aspek kebijakan yang bersifat makro. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada perilaku staf dalam menggunakan SIKN, respon terhadap sistem, serta kendala yang muncul selama proses penggunaannya.